I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang secara geografis memiliki lautan lebih luas dari pada daratan dengan garis pantai 104.000,00 km² . Luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km² dengan luas lautan sebesar 3.544.743,9 km² atau 64,97 persen dari total wilayah Indonesia (KKP, 2011). Besarnya potensi laut membuat Indonesia memiliki berbagai sumber daya hayati, mineral, dan energi (**Widiyaningsih dan Muflikhati, 2015**).

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan PPS Bungus secara konseptual merupakan pengejawantahan dari tugas pokok Pelabuhan Perikanan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yakni melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasi kapal perikanan (**PPS Bungus, 2020**).

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir berjumlah 7,8 juta jiwa yang tersebar di 10.639 desa pesisir dan 2,2 juta jiwa diantaranya termasuk dalam kategori sangat miskin (**KKP, 2011**) dari jurnal (**Bapennas. 2014**) Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) penduduk miskin di indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 % di antaranya masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (Statistik, 2008), penduduk miskin di indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 % di antaranya masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Dengan potensi demikian besar, kesejahteraan nelayan sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,

memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi pendapatan devisa negara terutama sebuah perdesaan (**Bappenas, 2014**).

Dalam kehidupan masyarakat nelayan, nelayan sangat rentang menghadapi sejumlah masalah, termasuk politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Sehingga, nelayan-nelayan di wilayah pesisir adalah lemah kedudukannya dalam permodalan, lemah dalam akses memperoleh kredit bank, lemah dalam pendidikannya, lemah dalam sarana atau peralatan produksinya, serta lemah dalam menghadapi faktor-faktor alam, perubahan musim dan pasar, sehingga kehidupan nelayan tetap miskin, bahwa masyarakat lokal pesisir rendah tingkat kesejahteraannya (**Ardisasmita, R. 2015**).

Meskipun perekonomian yang tumbuh dengan pesat, namun banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan atau rentan untuk masuk kategori miskin (World Bank, 2012). Perikanan merupakan sektor perekonomian yang berkaitan erat dengan kemiskinan dan telah ada sejumlah program - program untuk meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan (**Stanford et al., 2013**)

Dari gambaran yang telah di kemukakan di atas Sehingga saya tertarik melakukan penelitian dengan berjudul pendapatan rumah tangga nelayan bagan yang di daratkan di Pelabuhan perikanan samudera (PPS) bungus kota padang.

1.2 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuannya adalah :

1. Analisa tingkat pendapatan dan kesejahteraan Nelayan Bagan (*Lift Net*) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus.
2. Analisis Kesejahteraan Nelayan Berdasarkan BKKBN 2018

1.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang tingkat pendapatan dan kesejahteraan bagan (*lift net*) di Pelabuhan perikanan samudera (PPS) Bungus kota padang Sumatera barat. Dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah setempat terkait guna dan fungsi kesejahteraan nelayan berdasarkan BKKBN 2018.